

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan limbah batik dalam mendukung usaha pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta belum berjalan dengan baik. Di dalam pengelolaan limbah batik, kenyataannya pola pendekatan produksi bersih belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena sebagian besar industri batik di kota Yogya membuang limbah tanpa melalui proses pengolahan sesuai dengan peraturan ataupun perizinan yang mengatur mengenai hal tersebut serta belum adanya tindakan konkrit dari instansi terkait untuk melakukan penindakan terhadap industri batik yang telah melanggar baku mutu limbah industri khususnya limbah industri batik.
2. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah industri batik dalam mendukung usaha pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta adalah tidak adanya efisiensi (inefisiensi) dalam pengolahan industri batik pada tahapan proses produksi, kurangnya pelatihan terhadap pengusaha batik guna melakukan produksi karena industri batik banyak dilakukan oleh masyarakat secara mandiri (*home indsutri*), dan pengelolaan limbah industri batik tidak sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP).

## **B. Saran**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi, air, bahan baku dan bahan penolong perlu pemahaman dan implementasi produksi bersih oleh pihak pemilik perusahaan dan para pekerja melalui pelatihan atau penataran atau *benchmark* terhadap perusahaan yang sudah menerapkan produksi bersih.
2. Untuk penanganan limbah yang dibuang langsung ke lingkungan dan mengingat biaya pengolahan limbah sangat mahal dan memberatkan pengusaha kecil, diperlukan suatu IPAL bersama yang diprakarsai oleh pihak Pemda.
3. Instansi terkait perlu lebih melakukan pengawasan dan penindakan terhadap industri batik yang membuang limbah tanpa melalui proses pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan ataupun perizinan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Agung Suryawan Wiranata, *Pengelolaan Objek Wisata Berbasis Masyarakat*, Tim Pengkajian Kepariwisata Provinsi Bali, 2007.
- Djulianto Susantio, *Memaksimalkan Potensi Pariwisata di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986.
- Hadinoto, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*, UI Press, Jakarta, 1996.
- Hari Karyono, *Kepariwisata*, Gramedia, Jakarta, 1997.
- I Gede Ardika, *Kepariwisata Untuk Siapa?*, Kompas, Senin, 13 Maret 2006, Edisi Jawa Barat.
- Ina Herliana Koswara, *Karakteristik Wisatawan: Siapa dan Bagaimana Mereka?*, Pusat Penelitian Kepariwisata, Bandung, 2001.
- I Nengah Subadra, *Hubungan dan Permasalahan antara Pariwisata Kebudayaan, dan Bahasa*, Akademi Pariwisata Tri Atmaja, Bandung, 2005.
- Nyoman S. Pendit, *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Oka Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung, 1981.
- Richard Sihite, *Hotel Management Pengelolaan Hotel*, SIC, Surabaya, 2000.
- Riyanto, Pamungkas, W., dan Muhammad Amin Ja'far, *Katalog Batik Indonesia*, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan batik. Proyek Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Kerajinan dan Batik. Yogyakarta, 1997.
- Sedyawati, *Arkeologi dan Jatidiri Bangsa*, Pada Pertemuan Ilmiah Arkeologi VI, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta, 1992/1993.
- Sumantri, I., Sumarno, A. Nugroho, Istadi, dan L. Buchori, *Pengolahan Limbah Cair Industri Kecil Batik dengan Bak Anaerobik Bersekat (Anaerobic Baffled Reaktor)*, Undip, Semarang, 2006.

Supratikno Rahardjo, *Penelitian dan Pemanfaatan Sumberdaya Budaya*, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Komisariat Jawa Barat - Banten, Bandung, 2008.

Suzaki Kiyoshi, *Tantangan Industri Manufaktur, Penerapan Perbaikan Berkesinambungan*, saduran oleh Kristianto Jahja, Productivity & Management Consultant, Jakarta, 1991.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 7 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, Dan Jasa Pariwisata Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **C. Website**

I Nengah Subadra, diakses dari <http://subadra.wordpress.com/2007/04/06/bali-tourism-watch-definisi-pariwisata>.

<http://unesco.batikindonesia.htm>, [www. Kompas-tv.com](http://www.kompas-tv.com), tanggal 21 Juni 2011.

<http://menlh.go.id>, tanggal 12 Juni 2011.

<http://menlh.go.id>, tanggal 12 Juni 2011.